

Selasa, 26 Juli 2011

Fraksi Partai Demokrat

Laporan BPK, Asset Kapet dan Kesiapan Sambut Ramadan

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya N.Ch.Saiyan, SH, MH., menyampaikan tujuh pertanya-

an untuk Pemerintah Daerah. Tujuh pertanyaan itu berkaitan dengan hasil laporan BPK,

...Ke Halaman -2

Laporan BPK, Asset Kapet dan Kesiapan Sambut Ramadan

distribusi BBM, asset Kapet Sambas, kordinasi antara Kapet dan badan pengelola perbatasan, distribusi sembako menjelang Ramadan, operasi pasar menghadapi puasa dan hari raya, dan pengerukan muara Sungai Kapuas. Berikut petikannya:

Untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dan rekomendasinya terhadap laporan pertanggungjawaban APBD provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010, DPRD provinsi Kalimantan Barat akan membentuk panitia khusus, supaya lebih fokus

dalam pembahasannya dan sebagai bahan pengawasan DPRD provinsi Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pandangan umum fraksi ini ada beberapa hal yang ingin kami minta penjelasan kepada pemerintah daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010, sebagai berikut :

A. Pengelolaan barang milik daerah provinsi kalimantan barat belum memadai dan penyajian saldo aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp.2.112.224.096.841,75 atau rp 2 triliun lebih tidak andal;

B. Penyajian anggaran dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.35.590.439.887,38 dan belanja daerah minimal sebesar Rp.83.938.669.106,00 tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan;

C. Penyajian realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp.4.054.320.344,29 pada rumah sakit umum dae-

rah dr. Soedarso tidak wajar;

2. Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini distribusi BBM cukup merealisasikan masyarakat Kalimantan Barat, terlihat sehari-hari banyak antrian BBM di SPBU-SPBU. Kami mohon penjelasan sejauhmana kuota dan pengawasan distribusi BBM di Kalimantan Barat;

3. Aset tanah milik Badan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau BP Kapet yang dibeli menggunakan APBD provinsi Kalimantan Barat di Sambas, mohon penjelasan tentang penggunaan lahan

tersebut;

4. Bagaimana koordinasi Badan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau BP Kapet dengan badan pengelola perbatasan?;

5. Bagaimana kondisi distribusi sembako di Kalimantan Barat saat ini? Terutama dalam menghadapi bulan puasa dan hari raya Idulfitri, mohon penjelasan;

6. Bagaimana dengan pelaksanaan pengerukan alur muara sungai Kapuas?;

7. Sejauhmana pelaksanaan operasi pasar untuk mengantisipasi bulan puasa dan hari raya Idulfitri mendatang?